

**DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2026**

Nama Organisasi	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat
Tugas Pokok	: Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perumusan program kerja di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</li><li>2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;</li><li>3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;</li><li>4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;</li><li>5. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;</li><li>6. Pembinaan sosialisasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</li><li>7. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;</li><li>8. Pengoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</li><li>9. Pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;</li><li>10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;</li><li>11. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;</li><li>12. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan</li><li>13. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol>

KINERJA UTAMA /TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Kinerja Sasaran			PENJELASAN/FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET.
		2024	2025	2026				
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB				
2. Meningkatnya Fasilitasi Dokumen Kependudukan	Persentase Fasilitasi Dokumen Kependudukan	77,25	79,8	82,35	$\frac{\text{Jumlah perekaman KTP – el}}{\text{Jumlah Wajib Rekam KTP – el}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah Kepemilikan KIA}}{\text{Jumlah Wajib KIA}} \times 100$	Dukcapil Prov. Kalbar	DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri	Adalah persentase wajib KTP-el dan yang memiliki KTP-el, dan persentase penduduk wajib KIA yang memiliki KIA
3. Meningkatnya Fasilitasi Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	75,75	78,5	81,25	$\frac{\text{Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 18 tahun wajib akta}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah akta perkawinan yang dilaporkan}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah akta perceraian yang dilaporkan}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah akta kematian yang dilaporkan}} \times 100$	Dukcapil Prov. Kalbar	DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun</li> <li>- Persentase kepemilikan akta perkawinan yang dilaporkan</li> <li>- Persentase kepemilikan akta perceraian yang dilaporkan</li> <li>- Persentase kepemilikan akta kematian yang dilaporkan</li> </ul>

KINERJA UTAMA /TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Kinerja Sasaran			PENJELASAN/FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET.
		2024	2025	2026				
4. Meningkatnya Kualitas Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Kualitas Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan	95	95	96,67	$\frac{1}{2} + \left\{ \frac{(\sum \text{DKB 1} + \text{DKB 2})}{2} + \left\{ \frac{(\sum \text{PKS Provinsi})}{\text{Target PKS Nasional}} \times 100 \right. \right.$	Kepala Dinas	DKB Ditjen Dukcapil dan Data PKS Provinsi	
5. Menurunnya Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)	Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR) per PUS WUS usia 15 – 19 Tahun	2.19	2.18	2.17	$TFR = \frac{1}{1000} \times 5 \sum_{i=1}^7 \text{ASFR}_i$	Dukcapil Prov. Kalbar	Metadata Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 BKKBN	
6. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi / Unmet Need	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64.55	66.66	68.77	Indeks Ketentraman + Indeks Kemandirian + Indeks Kebahagiaan $i\text{Bangga} = \frac{\text{Kebahagiaan}}{3}$	Dukcapil Prov. Kalbar	Metadata Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 BKKBN	
7. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi / Unmeet Need (%)	7.6	7.5	7.3	$U = U_L + U_S$	Dukcapil Prov. Kalbar	Metadata Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 BKKBN	

Pontianak, Februari 2024  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Kalimantan Barat



**YOHANES BUDIMAN, S.IP., M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19691215 198903 1 004